



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) 2020



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TAHUN 2021



Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan berkahNya, sehingga penyelesaian penyusunan LAKIP 2020 dapat diselesaikan.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Sumatera Barat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai penunjang maupun perangsang pertumbuhan ekonomi rakyat dan mendukung sektor lainnya.

Terwujudnya Good Governance merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna serta bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik.

Laporan ini menggambarkan capaian indikator kinerja tahun 2020 yang mencakup aspek pendukung yang memberikan kontribusi bagi terwujudnya good governance dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan demikian laporan ini juga diharapkan akan dapat menjadi umpan balik untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat untuk masa yang akan datang.

Demikian disampaikan, kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan ataupun penyusunan laporan ini, atas kerja samanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

HERI NOFIARDI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621119 198611 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan tugas/ kegiatan sekarang ini berpedoman kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang menjadi wewenang atau yang telah diamanahkan/ digariskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai suatu instansi yang bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan Pelayanan atau Pembinaan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas Aparatur serta mendorong terwujudnya capaian kinerja dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang lebih terarah, berdasarkan Renstra 2016-2021 dan mengaplikasikannya kepada kegiatan-kegiatan tahunan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas telah ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran yang menjadi Pedoman dan Pengukuran Kinerja Instansi. Dalam tahun 2020 nilai Capaian Kinerja Dinas Perhubungan dengan total pagu dana Rp. 19.347.174.826,00 terealisasi sebesar Rp. 18.314.413.742,00 (94,66%) dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 9.225.257.931,00 terealisasi sebesar Rp. 8.885.167.654,00 (96,31%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.121.916.895,00 terealisasi sebesar Rp. 9.429.246.088,00 (93,16 %). Dengan dikerluarkannya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah, sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Untuk belanja langsung terdapat 15 kegiatan yang di nolkan anggarannya dan 43 kegiatan yang dirasionalisasikan (dikurangi) karena refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19. Total anggaran untuk belanja urusan yang refocusing Rp. 6.570.662.145 dan pengurangan pada saat APBD perubahan ini adalah Rp. 136.431.133

Beriku Matriks Rasionalisasi Anggaran Dinas Perhubungan T.A 2020 :

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah refocusing	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	Yang Dinolkan				
I	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90.000.000	-	-	-90.000.000
1	Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	-	-	-50.000.000
2	Pengadaan Mebeleur	40.000.000	-	-	-40.000.000
II	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	337.328.865	-	-	-337.328.865



3	Pengadaan Dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour De Singkarak	160.617.533	-	-	-160.617.533
4	Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) Di Sumatera Barat	176.711.332	-	-	-176.711.332
III	Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.672.244.300	-	-	-1.672.244.300
5	Studi Implementasi Keterminal Tipe B Rawamangun dan Terminal Tirtonadi Solo	64.841.400	-	-	-64.841.400
6	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVII Tahun 2020	889.825.000	-	-	-889.825.000
7	Pemilihan Abdi Yasa Teladan	127.715.000	-	-	-127.715.000
8	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	135.872.500	-	-	-135.872.500
9	Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional	55.950.800	-	-	-55.950.800
10	Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum	198.400.000	-	-	-198.400.000
11	Penghargaan Wahana Tata Nugrahan	199.639.600	-	-	-199.639.600
IV	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	12.453.475	-	-	-12.453.475
12	Evaluasi Dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12.453.475	-	-	-12.453.475
VI	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	318.606.920	-	-	-318.606.920
13	Pembangunan Pembatas Jalan dengan Jalur KA untuk Peningkatan Keselamatan KA	195.335.920	-	-	-195.335.920
14	Sosialisasi Keselamatan Kereta Api	123.271.000	-	-	-123.271.000
V	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	29.588.000	-	-	-29.588.000
15	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Angkutan Laut	29.588.000	-	-	-29.588.000
Total Yang Dinolkan					-2.460.221.560
Yang Dirasionalisasikan					
I	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.642.803.213	2.401.167.887	2.314.770.659	-328.032.554
1	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1.561.200.000	1.561.200.000	1.553.141.772	-8.058.228



2	Penyediaan Alat Tulis Kanto	126.000.000	96.000.000	96.000.000	-30.000.000
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.502.400	82.502.400	82.502.400	-20.000.000
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.802.246	42.802.246	37.802.246	-5.000.000
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	287.913.000	258.508.000	214.169.000	-73.744.000
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	487.385.567	335.155.241	306.155.241	-181.230.326
7	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.000.000	25.000.000	25.000.000	-10.000.000
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	286.770.000	197.281.550	233.418.073	-53.351.927
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190.000.000	142.511.550	178.648.073	-11.351.927
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	37.770.000	17.770.000	17.770.000	-20.000.000
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	35.000.000	25.000.000	25.000.000	-10.000.000
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	24.000.000	12.000.000	12.000.000	-12.000.000
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	134.250.000	134.250.000	124.834.200	-9.415.800
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	134.250.000	134.250.000	124.834.200	-9.415.800
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.868.499	32.558.918	32.558.918	-180.309.581
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	212.868.499	32.558.918	32.558.918	-180.309.581
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	353.874.860	302.231.943	300.733.817	-53.141.043
14	Penatausahaan Keuangan SKPD	219.400.000	206.600.000	206.600.000	-12.800.000
15	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	64.788.660	50.945.743	50.945.743	-13.842.917
16	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	69.686.200	44.686.200	43.188.074	-26.498.126
VI	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.270.777.793	973.486.793	932.062.598	-1.338.715.195
17	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	991.221.000	2.650.000	2.650.000	-988.571.000
18	Pengadaan Dan Pemasangan (Rambu, Rarka, Guardrail, deliniator, cermin Tikungan, traffic Light Dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan	1.020.556.793	711.836.793	671.407.616	-349.149.177
19	Pemeliharaan/perawatan (Rambu, marka,	259.000.000	259.000.000	258.004.982	-995.018



	Guardrail, deliniator Dan Traffic Light) Sarana Perlengkapan Jalan				
VII	Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.570.538.688	300.608.517	297.854.279	-2.272.684.409
20	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan jalan.	249.500.000	6.505.550	6.505.550	-242.994.450
21	Penyediaan pelayanan angkutan pekan nasional tani dan nelayan tahun 2020	1.509.270.000	945.000	945.000	-1.508.325.000
22	Buku Statistik Perhubungan	30.000.000	30.000.000	29.225.000	-775.000
23	Pemantauan Angkutan Lebaran	40.154.764	40.154.764	38.175.526	-1.979.238
24	Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dengan Instansi Terkait	272.815.550	83.666.000	83.666.000	-189.149.550
25	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	40.040.000	8.419.000	8.419.000	-31.621.000
26	Pembinaan Dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor	15.203.000	2.805.000	2.805.000	-12.398.000
27	Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov.Sumbar	62.000.350	1.361.000	1.361.000	-60.639.350
28	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	87.107.800	19.453.600	19.453.600	-67.654.200
29	Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A Dan B / Di Jalan	86.197.224	39.548.000	39.548.000	-46.649.224
30	Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum	128.500.000	29.161.603	29.161.603	-99.338.397
31	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Untuk Para Calon Jemaah Haji	49.750.000	38.589.000	38.589.000	-11.161.000
VIII	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	204.311.625	104.374.350	104.374.350	-99.937.275
32	Penilaian Andalalin di Jalan Provinsi Sumbar	30.000.000	271.500	271.500	-29.728.500
33	Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	113.256.025	65.302.500	65.302.500	-47.953.525
34	Monitoring Dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis	61.055.600	38.800.350	38.800.350	-22.255.250
IX	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	462.884.900	311.235.426	298.982.726	-163.902.174
35	Pengumpulan dan Analisis Data Angkutan Kereta Api di Sumbar	51.067.400	51.067.400	39.819.400	-11.248.000
36	Investigasi Kecelakaan Kereta Api dan Inventarisasi Keselamatan Kereta Api	75.000.000	54.674.750	54.674.750	-20.325.250



37	Monitoring Pelayanan Angkutan Kereta Api Perintis di Sumbar	29.323.600	651.000	651.000	-28.672.600
38	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api Pada Ruas Jalan Di Sumatera Barat	179.172.200	179.172.200	178.167.500	-1.004.700
39	Pengembangan/Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat	128.321.700	25.670.076	25.670.076	-102.651.624
X	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	929.956.000	548.323.335	468.323.335	-461.632.665
40	Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar	51.244.000	4.601.450	4.601.450	-46.642.550
41	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Tua Pejat dan Sinakak	603.712.000	456.712.000	376.712.000	-227.000.000
42	Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar	150.000.000	75.000.000	75.000.000	-75.000.000
43	Pembinaan Tentang Keselamatan Pelayaran Kab/Kota Se Sumbar	125.000.000	12.009.885	12.009.885	-112.990.115
Total Yang Dirasionalisasikan					-4.961.122.623
Total Pagub yang Dinolksn dan Dikurangi					-7.421.344.183

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan terdapat 5 kegiatan yang realisasinya dibawah 90% yaitu :

1. Pemeliharaan/perawatan (rambu, Marka, Guardrail, Deliniator, dan Traffic Light) Sarana Perlengkapan Jalan.
Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 258.004.982, terealisasi sebesar Rp. 222.121.357 (86,09%). Sisa anggaran sebesar 35.883.625 merupakan sisa belanja perjalanan dinas, yang semula diperkirakan pelaksanaannya untuk dua kali perjalanan dinas ke titik lokasi pemasangan, tetapi bisa dilakukan hanya dengan satu kali perjalanan dinas ke titik lokasi pemasangan sarana perlengkapan jalan.
2. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum (SIMPAU)
Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 22.837.500, realisasi sebesar Rp. 824.00 (3,61%). Sisa anggaran Rp. 22.013.500 merupakan jasa konsultan yang tidak terealisasi karena tidak terjadi kerusakan/masalah pada aplikasi ini. Jadi kegiatan ini pada dasarnya adalah biaya perawatan aplikasi yang sifatnya insidental, digunakan apabila terjadi masalah/kendala pada aplikasi tetapi harus tersedia (standby) untuk digunakan.



3. Penyediaan Pelayanan Angkutan Umum MTQ ke XXVIII

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.805.611.800, terealisasi sebesar Rp. 1.443.292.500 (79,93%). Sisa anggaran sebesar Rp. 362.319.300 merupakan akumulasi dari :

- Sisa kontrak atas tender belanja sarana mobilitas darat Rp. 90.538.000
- Belanja pakaian kerja lapangan Rp. 43.890.000, merupakan efisiensi akibat dikurangnya volume pesanan pakaian kerja lapangan sesuai kebutuhan di lapangan.
- Perjalanan dinas dalam daerah Rp. 104.265.000, merupakan efisiensi akibat lokasi lomba yang semula diperkirakan di Kab. Padang Pariaman, ternyata berada di wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
- Perjalanan dinas luar daerah Rp. 57.357.000, belanja perjalanan dinas luar daerah ini pada awalnya dianggarkan untuk koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan MTQ, tetapi tidak digunakan karena situasi pandemic COVID-19 dan tidak adanya undangan dari pemerintah pusat.
- Makan minum rapat Rp. 26.535.000, belanja ini semula dianggarkan untuk beberapa kali rapat, tetapi karena situasi COVID-19 volume rapat dan jumlah undangan (peserta rapat) yang hadir harus dibatasi. Sehingga terdapat sisa atas belanja ini.
- Cetak (sticker MTQ) Rp. 15.000.000, merupakan efisiensi dari belanja cetak sticker untuk armada transportasi MTQ.
- BBM Rp. 17.505.600, merupakan efisiensi BBM perjalanan dinas.
- Perlengkapan pakai habis (kokarde, banner, plat tanda kendaraan) Rp. 7.208.800, merupakan efisiensi dari belanja dari pembuatan kokarde, banner, dan plat tanda kendaraan.

4. Peningkatan Kapasitas dan Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PHJD)

Anggaran kegiatan ini merupakan hibah dari kementerian PUPR sesuai PP No 33 tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan PermenKeu No 224/PMK/07/2017, tentang pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 775.259.478 terealisasi sebesar Rp. 629.452.600 (81,19%). Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 145.806.878 yang merupakan belanja honorium. Forum Lalu Lintas dan



Angkutan Jalan (FLLAJ) sebesar Rp. 123.000.000 yang tidak bisa dibayarkan karena tidak ada standar biayanya pada Pergub No 29 tahun 2020 tentang standar biaya APBD.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan baik namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan Kinerja Dinas untuk itu perlu pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN ESEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	18
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.3 Penetapan Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	29
A.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini	30
A.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	37
A.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat	39
A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	44
A.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
A.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	48
B. REALISASI ANGGARAN	63
BAB IV PENUTUPAN	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Sumatera Barat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perangsang pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya.

Untuk bisa menjalankan peran tersebut, pembangunan Perhubungan dilakukan terintegrasi antar moda transportasi Darat, Laut dan Udara yang mengacu kepada Tataran Transportasi Wilayah (TATRAWIL) Sumatera Barat dan Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) yang merupakan keharusan sebagai pedoman Pembangunan Perhubungan secara nasional serta RPJMD Sumatera Barat 2016 – 2021.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam kedudukan sebagai salah satu Dinas dilingkungan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Barat dituntut untuk dapat mewujudkan Kinerja Aparatur Pemerintah dan kelembagaan Daerah dalam menghadapi tuntutan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun pedoman dari penyusunan LAKIP SKPD ini adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pasal 35 dan Pasal 37. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja SKPD Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat.



Surat Edaran Gubernur Nomor : 065/291/ED/GSB-2020 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Gubernur (pergub) Sumatera Barat No. 03/2018 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat adalah:

Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Perhubungan.

Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang Perhubungan Lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas.
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, dan Pelayaran.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. KEPALA DINAS

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas - atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan;



- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan Perhubungan;
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, LKPJ, dan LPPD Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis Perhubungan;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan;
- c. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan;
- d. Bidang Pelayaran;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok jabatan Fungsional.

2. SEKRETARIAT

Mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Hubungan masyarakat, protokol, penyusunan Program dan Keuangan .



Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretariat dibantu oleh :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas Pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Mempunyai tugas Pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN PEMBINAAN KESELAMATAN

Bidang Lalulintas dan Keselamatan mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bidang Lalulintas dan Pembinaan Keselamatan serta penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Lalulintas dan Pembinaan Keselamatan .

Bidang Keselamatan Angkutan Darat dibantu oleh:

a. Seksi Lalulintas.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalulintas serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalulintas Jalan .

b. Seksi Pengendalian Operasional.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Bidang Pengendalian operasional.



c. Seksi Pembinaan Keselamatan.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi dan penanganan Keselamatan Transportasi, Promosi dan Kemitraan Keselamatan, perusahaan Angkutan Umum serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Bidang Pembinaan Keselamatan .

4. BIDANG ANGKUTAN JALAN, PERKERETAAPIAN DAN PENGEMBANGAN

Mempunyai tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan .

Bidang ini membawahi:

a. Seksi Angkutan dan Pemaduan Moda.

Mempunyai tugas pokok melakukan Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Angkutan dan Pemaduan Moda serta penerapan teknologi , informasi dan komunikasi Bidang Angkutan dan Pemaduan Moda.

b. Seksi Perkeretaapian

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporandi bidang Perkeretaapian.

c. Seksi Pengembangan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang pengembangan, pengelolaan system informasi manajemen dan komunikasi transportasi, pengembangan transportasi serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Pengembangan.



Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan.

5. BIDANG PELAYARAN

Bidang Pelayaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Pelayaran.

Bidang Pelayaran dibantu oleh:

a. Seksi Kepelabuhanan

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pembangunan, Penerbitan Izin, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan Regional.

b. Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait angkutan Pelayaran

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Perizinan Usaha Angkutan Pelayaran serta Penerapan teknologi informasi dan komunikasi Bidang Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran.

c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang Angkutan pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud diatas, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayaran.



6. UPTD TERMINAL

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. UPTD Prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penunjang dinas di bidang penyelenggaraan prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan dalam operasional pengelolaan terminal tipe B.

Wilayah kerja UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi :

- a. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah I berkedudukan di Padang, meliputi terminal Sago Painan dan terminal Sawahlunto.
- b. UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II berkedudukan di Padang Panjang, meliputi terminal Bukit Surungan Padang Panjang, terminal Koto Nan Ampek Payakumbuh dan terminal Piliang Batusangkar.

Susunan organisasi UPTD prasarana perhubungan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penyelenggaraan Terminal;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal;
- e. Terminal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPTD :

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan, koordinasi atau sinkronisasi serta tidak berkaitan langsung



dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. UPTD Pengelolaan Terminal Tipe B memiliki fungsi :

- Menyusun program pembangunan, peningkatan, pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal penumpang angkutan jalan.
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang ketatausahaan;
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan terminal
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan terminal;
- Melaksanakan evaluasi kinerja pelayanan terminal penumpang angkutan jalan

Kepala UPTD membawahi :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Mempunyai tugas :

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang ketatausahaan UPTD pengelolaan terminal tipe B;
- Pengusulan dan penetapan operator operasional, operator sistem tiket dan satuan tugas pengamanan;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang sarana dan prasarana UPTD pengelolaan terminal tipe B;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi di bidang operasional UPTD pengelolaan terminal tipe B.

b. Kepala Seksi Penyelenggaraan terminal

Mempunyai tugas :

- Menyiapkan / melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data operasional terminal;
- Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan prngaturan operasional terminal;

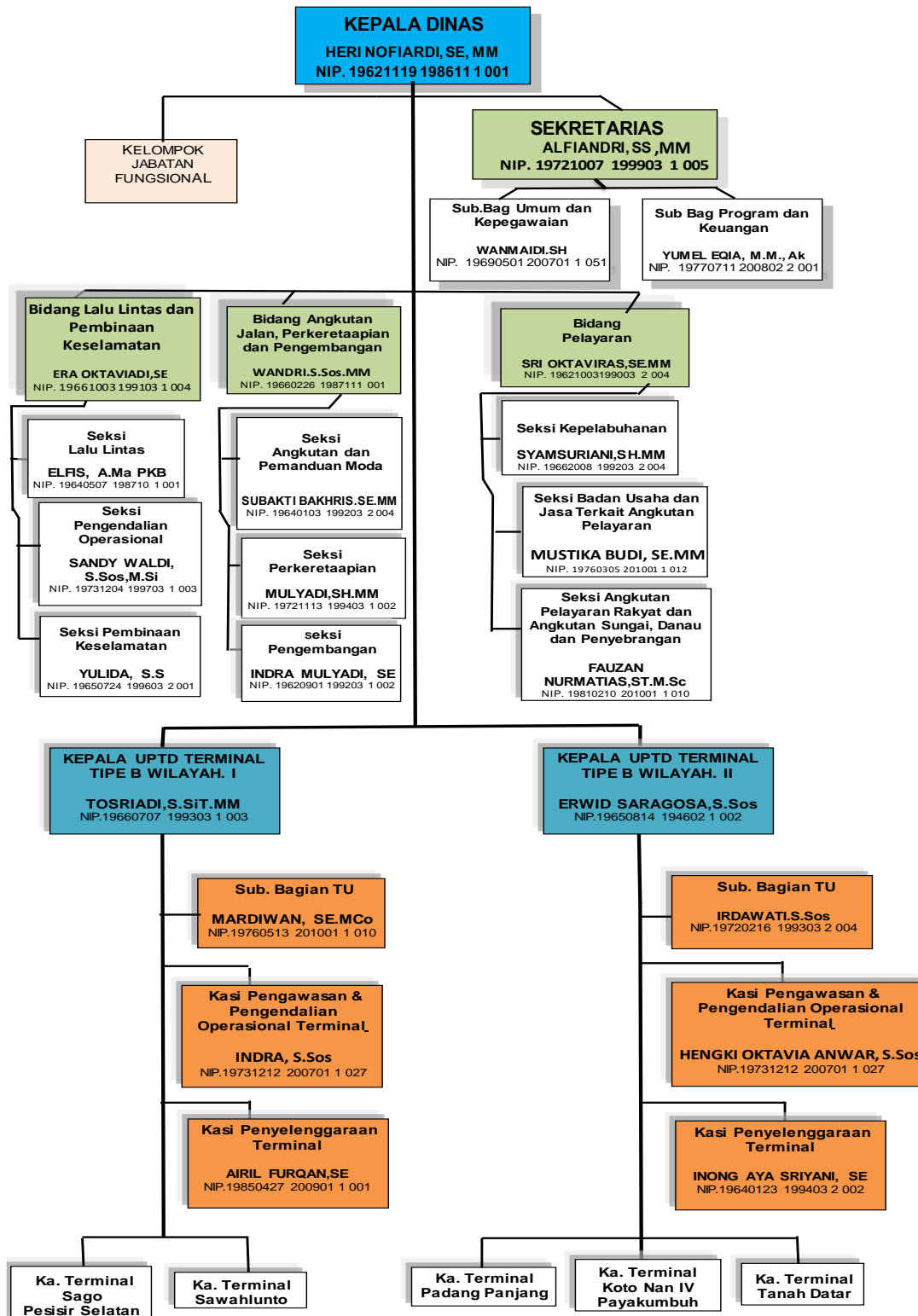


- Menyiapkan / melaksanakan bahan – bahan perencanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan pemungutan retribusi pada terminal;
 - Menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan terminal;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Operasional Terminal
- menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan pengawasan operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan bahan-bahan kegiatan peningkatan keselamatan angkutan penumpang umum;
 - menyiapkan/melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban operasional terminal;
 - menyiapkan/melaksanakan fasilitas pengawasan teknis dan laik jalan serta penegakan hukum dan pemantauan kinerja angkutan umum;
 - menyiapkan/melaksanakan pemantauan manajemen keselamatan, kinerja pelayanan angkutan orang dan kinerja perusahaan angkutan orang;
 - melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.



Berdasarkan Pergub No. 03 tahun 2018 dan Pergub No. 19 tahun 2019, berikut susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT





B. Aspek Strategi Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2020 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mencakup kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terhadap pelayanan bidang transportasi, anggaran, sumber daya aparatur, pelayanan publik, pengawasan dan akuntabilitas serta permasalahan strategi berikut :

1. Kondisi Saat Ini

Pelayanan bidang Transportasi

Permasalahan dan tantangan dalam pelayanan transportasi pada umumnya, masih dihadapkan pada peningkatan keselamatan, peningkatan kelancaran mobilitas serta masalah aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil seperti Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Selain itu masalah daya beli masyarakat yang masih rendah, dibanding biaya operasi dan investasi prasarana dan sarana transportasi, masih memerlukan subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Tantangan dalam program reformasi di bidang transportasi. Terutama dalam pelaksanaan dekosentrasi dan reposisi kelembagaan pemerintah di bidang transportasi untuk lebih memperjelas peran dan fungsi pemerintah, perlu lebih ditekankan pada peran regulator, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi peran serta swasta dan pemerintah provinsi dan kab/kota dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang efisien, akuntabel, kompetitif dan professional.

Anggaran

Pelaksanaan program pembangunan sektor perhubungan masih dihadapkan pada terbatasnya dana pemerintah untuk pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana yang ada saat ini dan dengan adanya pandemi COVID-



19 yang menyebabkan dirasionalisasinya anggaran sebanyak 4 kali tahapan, sehingga makin sedikit (menurun) kuantitas prasarana dan sarana yang mendapatkan perawatan, terutama transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, sarana ASDP serta sarana transportasi laut, dan udara.

Sumber Daya Aparatur

Kinerja Sumber Daya Aparatur Dinas Perhubungan yang tidak optimal dapat mempengaruhi produktivitas dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas aparatur itu sendiri. Tidak optimalnya kinerja tersebut diantaranya disebabkan oleh masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga teknis dan administratif di level pelaksana.

Mengantisipasi hal ini khususnya tenaga teknis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kualitas dan penambahan SDM, melakukan kerja sama (MoU) dengan pihak Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD. Dimulai sejak tahun 2014 tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor 384/VI/HK201/STTD-2014 dan nomor 120-4/GSD/2014. Selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan lagi perpanjangan selama 5 tahun tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang perhubungan darat nomor HK.201/6/14/STTD-2019 dan nomor 120-030-PKS/GSB-2019.

Dari tahun 2014 sampai dengan 2020 bertambahnya pegawai teknis Dinas Perhubungan sebagai berikut :

No	Jurusan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	D.IV Transportasi Darat	3		1	2	1	3
2	D.III LLASDP	1					
3	D.III LLAJ				2		
4	D.III Perkeretaapian	1				1	
5	D.II PKB			2			2
Jumlah Per Tahun		5		3	4	2	5



Berikut adalah komposisi ASN Dinas Perhubungan per 31 Desember tahun 2020 :

No	Uraian	S2	S1/ D.IV	D.III /D.II	SLTA	SLTP /SD	Jumlah
1	Eselon II	1					1
2	Eselon III	3	3				6
3	Eselon IV	7	7	1			15
4	Staf / Pelaksana		25	9	35	1	70
Jumlah Pegawai							92

Hasil dari MoU tersebut, hingga saat ini kebutuhan pelaksanaan yang sifatnya teknis secara umum sudah dapat terpenuhi. Namun disisi lain tenaga pelaksana yang bersifat administratif masih sangat kurang dari segi kuantitas dan kualitas (kompetensi). Hal ini disebabkan oleh :

1. Lemahnya pengelolaan dalam hal analisa jabatan dan analisis beban kerja yang menyebabkan komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional.
2. Kompetensi, disiplin, kemampuan, profesionalitas, dan produktifitas sebagian besar PNS belum memadai.
3. Belum maksimalnya perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis kinerja.
4. Kurangnya diklat/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pelaksana sesuai dengan jabatannya.
5. Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.



Pelayanan Publik

Sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat atas pelayanan Jasa Transportasi maka Dinas Perhubungan dituntut atas pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel maka Rencana Strategis ini diuraikan menjadi kegiatan yang akan dilakukan.

Pelayanan Publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan per-Undang-undangan.

Pemerintahan sekarang diarahkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan Pemerintahan sehingga profesionalitas Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima dapat dicapai. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sudah memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat yaitu Pelayanan Publik dibidang sebagai berikut :

- a. Angkutan Jalan Perkeretaapian dan Pengembangan
- b. Bidang Perhubungan Laut
- c. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan

Pengawasan dan akuntabilitas

- 1) Sistem dan proses pengawasan sudah mulai terkoordinasi dengan baik, transparan, dan diharapkan akan dapat memberikan jaminan adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan terwujudnya pemerintahan yang bersih.
- 2) Manajemen dan teknologi informasi saat ini dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal antara pemerintah pusat dan daerah, serta dapat mempercepat pengurangan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.



2. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi aparatur negara yang diharapkan, sesuai dengan arah kebijakan dalam RPJMD secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

a. Pelayanan Bidang Transportasi

Tidak adanya hambatan dan tantangan dalam pelayanan transportasi pada umumnya, dan khususnya peningkatan keselamatan, peningkatan kelancaran mobilitas (untuk koridor yang telah berkembang padat sehingga menimbulkan macet) serta masalah aksesibilitas pelayanan terutama pada pelayanan jasa transportasi di wilayah terpencil seperti Kepulauan Mentawai dan sekitarnya, yang belum seluruhnya dapat dijangkau secara memadai. Selain itu masalah daya beli masyarakat sebanding dengan biaya operasi dan investasi prasarana dan sarana transportasi, sehingga subsidi operasi dan dukungan investasi pemerintah yang cukup besar dalam upaya menyelenggarakan pelayanan transportasi yang murah dan terjangkau bagi seluruh masyarakat dapat terpenuhi.

b. Anggaran

Tersedianya dan terpenuhinya anggaran dalam Pelaksanaan program pembangunan sektor perhubungan untuk pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana yang ada saat ini, sehingga kondisi prasarana dan sarana yang kurang, bisa mendapatkan perawatan yang maksimal, terutama transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, sarana ASDP serta sarana Transportasi laut, udara dan postel.

c. Sumber Daya Manusia Aparatur

- 1) Sesuai Permenpan RB No 1 tahun 2020 tentang pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, bahwa pelaksanaan Analisis Beban Kerja nantinya dapat dijadikan tolak ukur untuk meningkatkan produktifitas kerja serta langkah – langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaann dan pembinaan Aparatur Negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Berkaitan dengan hal ini pengelolaan analisa



jabatan dan analisa beban kerja di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dapat dilaksanakan dengan maksimal sehingga komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang rasional, etika, moral, disiplin yang tinggi, netral, kompetensi dan kemampuan profesional sesuai dengan tantangan zaman serta produktivitas yang tinggi, dan tingkat penghasilan yang wajar sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab, kinerja, dan biaya hidup dapat dicapai secara maksimal.

- 2) Distribusi penempatan pegawai yang proporsional, sesuai tugas dan fungsi masing – masing bagian di dalam lingkup OPD, kebutuhan, dan kemampuan keuangan daerah.
- 3) Gambaran mengenai jenis dan persyaratan kompetensi aparatur, pola karir, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas; perencanaan karir yang mantap dengan memperhatikan kemampuan baik manajerial, teknis maupun fungsional, serta kinerja dan produktivitas.
- 4) Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program diklat serta kurikulum diklat yang mantap, dukungan Widyaiswara yang sesuai dengan kebutuhan kualitas dan kuantitas, sehingga mampu menghasilkan lulusan/alumni yang kompeten dan siap kerja.
- 5) Kinerja PNS yang dapat diukur melalui sistem pengukuran kinerja yang aktual sehingga dapat mencerminkan produktivitas PNS.
- 6) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang-peluang global, pemasaran invensi dan invasi masyarakat bangsa, serta pemulihan, peningkatan citra peradaban bangsa dalam masyarakat dunia.
- 7) Tingkat penghasilan yang proporsional sesuai dengan peran, tugas, tanggung jawab dan kinerja, sehingga PNS mampu menopang kehidupan keluarga mereka baik pada masa aktif maupun setelah pensiun.



d. Pengawasan dan akuntabilitas

- 1) Sistem dan proses pengawasan (internal dan eksternal) sudah terkoordinasi dengan baik, transparan, dan menjamin adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
- 2) Sistem informasi manajemen dan teknologi informasi serta otomasi dalam aparatur pemerintahan pusat dan daerah dapat menunjang proses pengambilan keputusan secara optimal dan pelayanan publik yang prima.

e. Pelayanan publik

Manajemen pelayanan publik dilandasi dan menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip pelayanan prima dan mengedepankan sikap melayani serta bersih dari unsur KKN melalui sistem akuntabilitas dalam pelayanan publik. Evaluasi kinerja pelayanan publik penting dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan Aturan Manajemen Keuangan Pemerintah. Undang-undang tersebut memuat perubahan manajemen keuangan pemerintah yang berbasis input ke arah manajemen keuangan berbasis output yang disebut manajemen keuangan berbasis kinerja (*performance based management*). Perubahan konsep manajemen keuangan tersebut meliputi perubahan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Untuk melaksanakan sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang mempertanggungjawabkan keuangan dan capaian kinerja, maka harus disinkronkan muatan-muatan yang terkandung dalam sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang mencakup program dan kegiatan, keluaran dan hasil, dan klasifikasi anggaran. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan pembangunan pada saat ini harus berbasis Kinerja, pengertian berbasis kinerja adalah program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah harus disertai dengan hasil (out come) untuk program dan keluaran (out put) untuk kegiatan.

Hasil dan keluaran tersebut harus terukur, dapat dicapai dan mempunyai perspektif waktu. Program, kegiatan dan kinerjanya (keluaran dan hasil) ini nantinya yang akan dimonitoring, dievaluasi dan dipertanggungjawaban berdasarkan anggaran yang ditetapkan sebab itu formulasi program, kegiatan serta kinerjanya (hasil dan keluaran) harus dianalisa dengan cermat.



2.1.2 Hubungan Hirarkis antara Tujuan, Sasaran dan Strategis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan• Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi• Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none">- Percepatan pembangunan/pengembangan transportasi dalam rangka peningkatan ekonomi dan daya saing daerah- Peningkatan konektivitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, objek wisata dan simpul transportasi- Penguatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi publik- Peningkatan transportasi yang berkeselamatan dalam menyukseskan program pemerintah menuju <i>Zero accident</i>- Peningkatan kualitas SDM, penggunaan teknologi informasi dalam penyediaan layanan public- Pembukaan ruang partisipasi publik dalam peningkatan pelayanan
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang didasari itikad baik- Menerapkan sistim kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain- Menerapkan keadilan dan kestaraan perlakuan terhadap pegawai instansi

Untuk menjabarkan tujuan dan sasaran agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama masing-masing Sasaran Strategis tersebut seperti digambarkan pada tabel berikut :



2.1.3 Hubungan Hirarkis antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terwujudnya Keselamatan Transportasi	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan• Meningkatnya Pelayanan Jasa Transportasi• Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase Jumlah Sarana Yang Berfungsi Baik2. Persentase Prasaran Yang Berfungsi Baik dan Prasarana Yang Dibangun3. Jumlah Wilayah Terpencil Yang Dapat Diakses4. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut5. Persentase Penurunan Pelanggaran Lau Lintas
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	<ol style="list-style-type: none">1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan khususnya perencanaan kinerja, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah membuat penetapan Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan dan dimuat dalam Buku Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kinerja yang akan di capai Dinas Perhubungan pada tahun 2020 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.



Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

2.2.1 Rencana Kinerja Sasaran (Kontrak Kerja) Sebelum Direvisi.

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah rencana pencapaian target yang menjadi sasaran bagi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan Perhubungan di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2020 adalah tahun pertama untuk Renstra Dinas Perhubungan periode tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %
		2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	1. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek
		2. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.500.000 orang
3.	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	20 %
4.	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi	Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598	APBD
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	APBD
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852	APBD
4	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350	APBD
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	298.982.726	APBD
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	APBD
JUMLAH		5.723.736.861	APBD

2.2.2 Rencana Kinerja Sasaran (Kontrak Kerja) Setelah Revisi

Setelah Anggaran 2020 dilaksanakan, terjadi beberapa kali revisi akibat relokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 atas Rencana Kerja Awal, yang menyebabkan terjadi perubahan pagu dana Program dan Kegiatan yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas dalam kebutuhan pelaksanaan realisasi keuangan COVID - 19. Perubahan yang dilakukan dalam rencana pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yaitu:

No	Program	Pagu Awal (Rp)	Pagu Setelah Refocusing (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)
1.	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.608.106.658	973.486.793	932.062.598
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	92.164.000	92.164.000
3.	Peningkatan Pelayanan Angkutan	6.524.501.733	3.370.364.090	3.446.609.852
4.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	422.965.100	310.594.350	310.594.350
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	781.491.820	311.235.426	298.982.726
6.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	1.0134.544.000	723.323.335	634.323.335

Dengan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID-19 secara langsung akan berakibat kepada sulitnya pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai Rencana Kerja Awal.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %
		2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	1. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek
		2. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.500.000 orang
3.	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	20 %
4.	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi	Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	932.062.598	APBD
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ	92.164.000	APBD
3	Peningkatan Pelayanan Angkutan	3.446.609.852	APBD
4	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	310.594.350	APBD
5	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	298.982.726	APBD
6	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	APBD
7	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.248.909.159	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.585.036	APBD
9	Peningkatan Disiplin Aparatur	124.834.200	APBD
10	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	32.558.918	APBD
11	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	366.292.721	APBD
JUMLAH		10.121.916.895	APBD

2.3 Penetapan Kinerja

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai atau diwujudkan selama setahun sebagaimana terlampir :



PENETAPAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80%	83%	103,75	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	372.168.103	349.912.603	94,02%
						Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dengan Instansi Terkait	83.666.000	83.666.000	100%
						Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum	22.837.500	824.000	3,61%
						Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A dan B di Jalan	39.548.000	39.548.000	100%
						Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)	196.955.000	196.713.000	99,88%
		2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %	75%	93,75%	Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum	29.161.603	29.161.603	100%
						Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	929.052.598	878.591.389	94,56%
						Pengadaan dan Pemasangan (Rambu, Marka, Guardril, Delinator, Cermin Tikungan, Traffic Light dan Zoss) Saranan Perlengkapan Jalan	671.407.616.	656.470.032	97,78%
						Pemeliharaan / Perawatan (Rambu, Marka, Guardril, Delinator, Cermin Tikungan, Traffic Light dan Zoss) Saranan Perlengkapan Jalan	258.004.982	222.121.357	86,09%



						Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian	203.837.576	203.491.394	99,83
						Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api Pada Ruas Jalan di Sumatera Barat	178.167.500	177.821.318	99,81%
						Pengembangan / Pembangunan Sranan Prasarana Kereta Api di Sumatera Barat	25.670.076	25.670.076	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	1. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek	2 Trayek	100%	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	643.323.335	621.080.055	96,54%
						Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis	100.000.000	96.972.869	96,67%
						Pembinaan Tentang Keselamatan Pelayaran Kab/Kota Se Sumbar	12.009.885	12.009.885	100%
						Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar	75.000.000	68.616.591	91,49%
						Pengawasan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dan Angkutan Pelayaran Rakyat di Sumbar	75.000.000	74.828.201	99,77%
						Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar	4.601.450	4.601.450	100%
						Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan laut Tua Pejat dan Sinakak	376.712.000	364.0510.059	96,64%



		2. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.500.000 orang	- (5.893.442 orang)	-	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	82.095.050	81.717.850	99,54%
						Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan	6.505.550	6.505.550	100%
						Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Tipe B	75.589.500	75.212.300	99,50%
3	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	20%	26%	130%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	434.512.103	412.184.303	94,86%
						Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dengan Instansi Terkait	83.666.000	83.666.000	100%
						Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum	22.837.500	824.000	3,61%
						Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A dan B di Jalan	39.548.000	39.548.000	100%
						Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)	196.955.000	196.713.000	99,88%
						Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum	29.161.603	29.161.603	100%
						Investigasi Kecelakaan dan Inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Rawan Longsor dan Bencana Alam	51.120.000	51.067.700	99,90%
						Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	8.419.000	8.399.000	99,76%
						Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor	2.805.000	2.805.000	100%



						Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	65.302.500	65.252.500	99,92%
						Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	65.302.500	65.252.500	99,92%
4	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi	Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%	-			



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu Instansi Pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, program, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sumbar Tahun 2020 menyajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan (Rencana Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020).

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi setiap indikator kinerja sasaran dengan targetnya, selain capaian setiap sasaran, LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 juga menyajikan capaian kinerja kegiatan Tahun 2020 yang dibiayai dari dana APBD Provinsi Sumatera Barat. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan). Selanjutnya pada akhir Tahun 2020 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selanjutnya selisih yang timbul akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (Performance Improvement).



Sebagai informasi tambahan Metodologi pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No.	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	SangatBaik
2	69% -84%	Baik
3	53% -68%	Cukup
4	<53%	Kurang

III. A.1 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mempunyai 3 (tiga) Sasaran Strategis. Dari 4 sasaran tersebut terdapat 7 Indikator Kinerja pembangunan Perhubungan yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2021. 4 (tiga) sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi
3. Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas
4. Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi



Dari 4 Sasaran Strategis ditetapkan 6 Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020, Indikator Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik
2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik
3. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses
4. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut
5. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas
6. Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja dari Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %	83%	103,75
		2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %	75%	93,75
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	1. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek	2 Trayek	100
		2. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.500.000 orang	- 5.893.442 orang	-
3.	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	20 %	26%	130
4.	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi	Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Rata – rata Capaian					105,5



Untuk tujuan adalah sebagai berikut :

TUJUAN			
Terwujudnya Keselamatan Transportasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
Rasio Kecelakaan Lalu Lintas	2,67	2,31	113,48

Dalam terwujudnya pengukuran capaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan cascading yang memiliki tujuan terwujudnya keselamatan transportasi (rasio kecelakaan lalu lintas). Untuk mengukur tercapainya tujuan tersebut terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Untuk sasaran I adalah sebagai berikut :

SASARAN I			
Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
1. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %	83 %	103,75
2. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80 %	75 %	93,75

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran-1, secara kumulatif tergambar bahwa secara umum capaian kerjanya melebihi target. Indikator 1 yaitu persentase sarana yang berfungsi baik, dengan persentase target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 83% dengan capaian kinerja 103,75% %. Hal ini ditunjang dengan lebih dioptimalkannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:



1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dengan Instansi Terkait
2. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum
3. Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A dan B di Jalan
4. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)
5. Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum

Dari beberapa kegiatan di atas dalam mendukung kinerja sasaran-1 juga berdampak kepada meningkatnya kesadaran operator angkutan umum dalam aturan berlalu lintas yang aman dan selamat untuk menunjang sarana yang lebih baik. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi yang baik, juga peran serta seluruh elemen dan instansi yang terlibat dalam pengawasan dan penertiban lalu lintas.

Indikator kinerja kedua yaitu, persentase prasarana perhubungan yang berfungsi baik. Dengan persentase target sebesar 80% dapat terealisasi sebesar 75% dengan capaian kinerja 93,75% %. Hal ini tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran COVID-19 yang membuat tidak optimalnya prasarana perhubungan. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

1. Pengadaan dan Pemasangan (Rambu, Marka, Guardril, Delinator, Cermin Tikungan, Traffic Light dan Zoss) Saranan Perlengkapan Jalan.
2. Pemeliharaan / Perawatan (Rambu, Marka, Guardril, Delinator, Cermin Tikungan, Traffic Light dan Zoss) Saranan Perlengkapan Jalan.
3. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api Pada Ruas Jalan di Sumatera Barat.
4. Pengembangan / Pembangunan Sranan Prasarana Kereta Api di Sumatera Barat.



Untuk sasaran II adalah sebagai berikut :

SASARAN II			
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
1. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek	2 Trayek	100 %
2. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.500.000 orang	- 5.893.442 orang	-

Pada sasaran II terdapat dua indikator kinerja, capaian kinerja untuk indikator 1 yaitu jumlah wilayah terpencil yang dapat diakses dapat terealisasi dengan capaian 100%. Pada tahun 2020 penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan Sinakak ditiadakan, dikarenakan refocusing anggaran COVID-19, namun tidak mempengaruhi indikator kinerja tersebut. Pendukung kegiatan – kegiatan dalam pencapaian kinerja seperti :

1. Pengawasan Pelayanan Angkutan Laut Perintis
2. Pembinaan Tentang Keselamatan Pelayaran Kab/Kota Se Sumbar
3. Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar
4. Pengawasan Pelayanan Angkutan Penyeberangan Perintis dan Angkutan Pelayaran Rakyat di Sumbar
5. Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar
6. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan laut Tua Pejat dan Sinakak

Pada sasaran II capaian kinerja untuk indikator 2 yaitu jumlah penambahan penumpang terangkut tidak dapat terealisasi secara optimal dikarenakan tidak beroperasinya secara optimal terminal tipe B akibat Peraturan Kemenhub Nomor PM 25 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dan diberlakukannya PSBB di Sumatera Barat berdasarkan instruksi Gubernur Sumbar Nomor 360/051/COVID-19-SBR/IV-2020 tentang



Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah penumpang secara signifikan. Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja, seperti :

1. Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan
2. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Tipe B

Untuk sasaran III adalah sebagai berikut :

SASARAN III			
Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	20 %	26%	130

Pada sasaran III capaian untuk indikator kinerja yaitu persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan persentase target sebesar 20% dapat terealisasi sebesar 26% dengan capaian kinerja 130%. Hal ini ditunjang dengan lebih dioptimalkannya kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja seperti:

1. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dengan Instansi Terkait
2. Perawatan Sistem Informasi Perizinan Angkutan Umum
3. Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A dan B di Jalan
4. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)
5. Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum
6. Investigasi Kecelakaan dan Inventarisasi Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas, Rawan Longsor dan Bencana Alam
7. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
8. Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor



Untuk sasaran III adalah sebagai berikut :

SASARAN IV			
Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	%CAPAIAN
Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100

Indikator Dinas Perhubungan Sumatera Barat mempunyai 11 program dan 83 kegiatan dengan total pagu dana Rp 19.347.174.826 terealisasi sebesar Rp 18.314.413.742 (94,66%) dengan rincian belanja Tidak Langsung sebesar Rp9.225.257.931 terealisasi sebesar Rp 8.885.167.654 (96,31%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.121.916.895 terealisasi sebesar Rp9.429.246.088 (93,16%).

Berkenaan dengan pencapaian sasaran tersebut diatas maka dilakukanlah pengukuran kinerja dengan metode membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dalam bentuk persentase, mengingat beragamnya pendapat dan formulasi dalam pengukuran kinerja sedangkan metode dan parameter khusus dalam pengukuran kinerja yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang belum ada maka Pengukuran Kinerja pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Tingkat pencapaian sasaran ditetapkan berhasil apabila presentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran sebesar 85% atau lebih.
- b. Persentase Capaian sasaran merupakan kumulatif dari capaian program-program yang digunakan untuk pencapaian kinerja sasaran yang bersangkutan.



- c. Capaian program diukur dari gabungan presentase kinerja kegiatan dengan catatan capaian program dikategorikan berhasil apabila sekurang-kurangnya kegiatan-kegiatan dalam program bersangkutan memiliki kinerja fisik diatas 90% dan kinerja keuangan tidak kurang dari 85%.
- d. Dalam hal realisasi kinerja fisik/keuangan kegiatan dalam program bervariasi maka capaian program/sasaran dihitung berdasarkan pembobotan dan kinerja fisik secara tertimbang (ttb) berdasarkan pagu anggaran.

Dengan menggunakan Asumsi sebagaimana point (a), (b), (c) dan (d) maka target indikator sasaran dicapai dengan mengkalkulasikan pencapaian target indikator kinerja kegiatan, ini dikarenakan pada tataran implementasi untuk mencapai sasaran dilakukan dengan melaksanakan kegiatan.

Asumsi-asumsi diatas diambil dalam rangka memastikan bahwa pengukuran/penilaian kinerja yang dilakukan memiliki dasar, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, legalitas dan ilmiah.

Disamping itu penggunaan asumsi-asumsi diatas juga dilakukan untuk mempermudah perhitungan dan penjabaran serta penjelasan terkait capaian kinerja dengan parameter dan data-data/informasi pendukung yang ada baik keluaran kegiatan, hasil maupun dampak dari pelaksanaan kegiatan pembangunan Perhubungan dimaksud sehingga dapat dipahami oleh pimpinan dan membantu dalam penentuan dan pengambilan kebijakan-kebijakan ditahun yang akan datang.

III.A.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Dalam tahun 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai 11 program dan 83 kegiatan dengan totoal pagu dana Rp 19.347.174.826 terealisasi sebesar Rp 18.314.413.742 (94,66%) dengan rincian belanja Tidak Langsung sebesar Rp9.225.257.931 terealisasi sebesar Rp 8.885.167.654 (96,31%) dan Belanja Langsung sebesar Rp 10.121.916.895 terealisasi sebesar



Rp9.429.246.088 (93,16%). Pada tahun 2020 terjadi perubahan dalam penentuan sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Perhubungan.

Untuk perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.A.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI		% CAPAIAN	
				2019	2020	2019	2020
1	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	1	Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	79%	83 %	101,28	103,75
		2	Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik	80%	75 %	100	93,75
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi	3	Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses	2 Trayek	2 Trayek	100	100
		4	Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut	1.543.469	- 5.893.442 orang	102,90	-
3	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	5	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	18%	26%	94,73	130
4	Meningkatnya Evaluasi Akuntabilitas Organisasi	6	Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	100
Rata-rata capaian						98,54%	105,5%

Dari tabel perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan tahun 2020, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Dari rata-rata capaian indikator, pada tahun 2020 lebih tinggi 5,98% dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019.
- b. Penggantian indikator pada tahun 2020 seperti Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik, Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik dan persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas.



III.A.3 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Tingkat keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu kepada 4 sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Dinas Perhubungan yang pertama adalah :
"Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Perhubungan"
diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :
 - a. Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik
 - b. Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik
2. Sasaran Dinas Perhubungan yang kedua adalah :
"Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi"
diukur dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :
 - a. Jumlah Wilayah Terpencil yang Dapat Diakses
 - b. Jumlah Penambahan Penumpang Terangkut
3. Sasaran Dinas Perhubungan yang ketiga adalah :
"Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas"
diukur dengan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas
4. Sasaran Dinas Perhubungan yang keempat adalah :
 - a. Niali Evaluasi Akuntabilitas Kinerja



Sebagai pedoman pembangunan Sektor Perhubungan mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Pembangunan Sektor Perhubungan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai penunjang ataupun perangsang pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya.

Untuk terlaksananya pembangunan Perhubungan yang terintegrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara, perencanaan pembangunan mengacu kepada Tatanan Transportasi Wilayah (Tatrawil) dan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Hal ini guna menyelaraskan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional sehingga dapat saling mendukung guna percepatan pembangunan.

Berdasarkan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, pembangunan sektor Perhubungan dituangkan ke dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai kewenangan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dibiayai dari dana APBD maupun APBN.

➤ **Evaluasi singkat mengenai sasaran dan harapan yang dicapai**

Pembangunan sektor perhubungan pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai penunjang ataupun perangsang pertumbuhan ekonomi dan mendukung berbagai sektor pembangunan lainnya. Sasaran sektor perhubungan memprioritaskan kepada peningkatan mutu pelayanan jasa transportasi dan peningkatan aksesibilitas transportasi umum diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi baik itu darat, laut dan udara secara maksimal.

Penetapan sasaran ini harapannya tentu dapat dicapai dengan adanya SDM yang berkualitas, ketersediaan anggaran yang mencukupi, serta dukungan dari pemangku kepentingan dan koordinasi yang baik dengan pemerintah Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan tentunya juga tidak terlepas dari peran serta aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan pelaksanaan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan fasilitas Perhubungan.



➤ **Perbandingan dan analisis rencana dengan realisasi :**

Dari 4 sasaran yang ditetapkan dengan 6 indikator capaian kinerja, dilihat dari rata-rata nilai capaian indikator sangat baik, karena melebihi dari 100 % yaitu sebesar 106,87 %.

Dasar perhitungan dan analisis kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan cara membandingkan antara analisis rencana kinerja dengan tingkat realisasi. Hal ini dikarenakan pengukuran pencapaian sasaran sebagian besar masih menggunakan indikator output atau belum menggunakan indikator outcome, sehingga hal ini menyebabkan tingkat kecenderungan dalam melakukan penilaian/pengukuran kinerja menjadi bias atau kurang obyektif.

Pembangunan Infrastruktur sektor perhubungan merupakan prioritas dalam pengembangan transportasi dengan mengupayakan melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat atas pelayanan jasa transportasi yang bersih, tepat waktu, aman dan nyaman.

Tabel : Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang Tertuang di Dalam Pengukuran Kinerja

No	Sasaran	Indikator outcome	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Saranan dan Prasarana Perhubungan	Persentase Sarana Perhubungan yang Berfungsi Baik Tahun 2019 : Jumlah kendaraan urus izin AKDP/AJDP = 1434 kendaraan Target kendaraan urus izin AKDP/AJDP= 1815 kendaraan Persentase = $(1434/1815) \times 100\% = 79\%$	78%	79%	101,28	



		<p>Tahun 2020 : Jumlah kendaraan urus izin AKDP/AJDP = 1506 kendaraan</p> <p>Target kendaraan urus izin AKDP/AJDP= 1815 kendaraan</p> <p>Persentase = $(1506/1815) \times 100\% = 83\%$</p>	80%	83%	103,75	
		<p>Persentase Prasarana Perhubungan yang Berfungsi Baik</p> <p>Tahun 2019 =</p> <p>Jumlah lokasi prasarana yang terpasang = 4 lokasi</p> <p>Jumlah target lokasi prasarana yang dipasang = 5 lokasi</p> <p>Persentase = $(4/5) \times 100\% = 80\%$</p> <p>Tahun 2020 :</p> <p>Jumlah lokasi prasarana yang terpasang = 3 lokasi</p> <p>Jumlah target lokasi prasarana yang dipasang = 4 lokasi</p> <p>Persentase = $(3/4) \times 100\% = 75\%$</p>	80%	80%	100	
2	Menurunnya Pelanggaran Lalu Lintas	<p>Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas</p> <p>Jumlah AKDP/AJDP yang ditilang tahun 2019 = 87 kendaraan</p> <p>Jumlah AKDP/AJDP yang ditilang tahun 2020 = 65 kendaraan</p> <p>Persentase = $(22/87) \times 100\% = 26\%$</p>	20%	26%	130	



Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa target-target indikator-indikator output dan outcome yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sebagaimana sudah dapat dipenuhi, untuk mendukung terwujudnya keselamatan transportasi dalam penerapan *zero accident* telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada Sekolah-sekolah tingkat SLTA di beberapa kab/kota se-sumatera barat ;
- Sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengemudi Angkutan Penumpang Umum;
- Sosialisasi tata cara berlalu lintas kepada pengusaha Angkutan orang dan barang;
- Pemeriksaan Kendaraan Bermotor secara gabungan dengan instansi terkait.
- Audit Keselamatan Jalan
- Pemasangan Prasarana Perlengkapan Jalan

III.A.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian kinerja, seringkali ditemui beberapa kendala yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan ataupun kendala dalam pencapaian sasaran.

Panjang seluruh jalur kereta api di Sumatera Barat tercatat sepanjang 304 KmSp, namun yang masih aktif beroperasi sepanjang 72,073 KmSp, saat ini perjalanan kereta api mencapai 22 x perjalanan KA sehari dan Teluk Bayur – Indarung sepanjang 12,637 km dengan perjalanan kereta api mencapai 16 x perjalanan KA sehari.

Pada Jalur KA Sumatera Barat tercatat 79 perlintasan sebidang kereta api yang resmi dan 173 tidak resmi. Kondisi tersebut yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan diperlintasan sebidang Kereta Api.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam perlintasan sebidang disepanjang jalur kereta api di Sumatera Barat ini antara lain :



- a. Pengembangan wilayah dan pertumbuhan pemukiman yang tidak disertai dengan komitmen untuk melakukan pengaturan dan pengawasan dari semua pihak menyebabkan tumbuhnya perlintasan liar (illegal).
- b. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan dan semakin tingginya intensitas perjalanan sehingga perlu peningkatan status perlintasan dari tidak dijaga menjadi perlintasan yang dijaga, sehingga sering terjadi kecelakaan.
- c. Pemerintah daerah tidak mampu mengurus perlintasan sebidang khususnya pada kabupaten/kota karena terkait dengan keterbatasan anggaran dan kewenangan dalam penganggaran dalam APBD.
- d. Lemahnya pengawasan sehingga munculnya perlintasan-perlintasan sebidang secara tidak terkendali sesuai dengan perkembangan daerah-daerah disepanjang jaringan jalur kereta api.
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas pada perlintasan dan jalur kereta api.

Untuk itu upaya yang dilakukan dalam mengantisipasi keamanan dan keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang adalah dengan melakukan adalah :

- a. Kegiatan MRL (Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas) pada perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan. Jumlah paket MRL ditetapkan berdasarkan wilayah/lokasi penanganan MRL, yang masing-masing paket meliputi pemasangan papan peringatan, rambu peringatan, larangan, marka dan petunjuk bagi pemakai jalan diperlintasan sebidang jalur KA. Pada tahun 2015 dilakukan kegiatan MRL sebanyak 3 paket dengan capaian fisik 100 %, dan dilanjutkan pada tahun 2018 dilakukan 1 paket kegiatan yang berlokasi di Kab. Padang Pariaman, dimana pelaksanaan fisik juga dengan capaian 100 %. Pada tahun 2020 dilakukan satu paket kegiatan yang berlokasi sepanjang jalur reaktifasi dari stasiun Padang ke stasiun Pulau Aie.
- b. Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian yang melibatkan pemangku kepentingan yang berada pada jalur kereta api yang kita nilai sangat rawan terjadi kecelakaan antara lain pengurus osis dan guru-guru sekolah, perangkat lurah dan kecamatan, polsek, wali nagari dan wali korong yang



diharapkan dapat menyampaikan lebih lanjut kepada jajaran yang terendah dilingkungannya. Kepada guru sekolah kita harapkan dapat menyampaikan kepada murid-muridnya untuk memperhatikan keselamatan ketika melintas jalur kereta api dan menanamkan disiplin berlalu lintas.

Untuk pelayanan transportasi Bidang Darat di Sumatera Barat, Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat menerima penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2018-2019 terbanyak untuk Kab/Kota di dalam 1 Provinsi diantaranya Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh dan Kab. Pasaman.

Untuk pelayanan transportasi di bidang laut dalam Renstra ditargetkan penyusunan dokumen pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2020 akan dilaksanakan penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan laut Tua Pejat dan Sinakak. Dikarenakan refocusing anggaran terealisasi hanya satu dokumen yaitu dokumen lingkungan pelabuhan laut Tua Pejat. Sedangkan pada tahun 2019 telah dilaksanakan penyusunan dokumen DED pengembangan pelabuhan laut Tua Pejat.

Dari hasil analisa terhadap kegiatan yang terkait dengan pencapaian target kinerja dapat disimpulkan bahwa penyebab keberhasilan pencapaian kinerja di beberapa kegiatan dikarenakan :

- a. Adanya Perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
- b. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
- c. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
- d. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.



Sementara penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pada beberapa kegiatan disebabkan antara lain :

- a. Banyaknya kegiatan yang mengalami refocusing anggaran COVID-19 membuat tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.
- b. Masih terdapat sisa anggaran pada beberapa kegiatan yang tidak dirasionalisasikan pada saat perubahan anggaran dengan tepat, sehingga realisasi keuangan rendah dan tidak mencapai target ≥ 95 %.
- c. Kurang tepatnya dalam menetapkan target kinerja, karena belum jelas antara output dan outcome yang ingin dicapai
- d. Kurangnya evaluasi terhadap target dan besaran target berdasarkan data series 5 tahun kebelakang.

Solusi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja terkait dengan hambatan yang ada di dalam proses pelaksanaan kegiatan :

- a. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
- b. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan secara berkala.

III.A.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sesuai dengan penjelasan pasal 9 huruf g UU no. 17 Tahun 2003, Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah termasuk Prestasi Kerja yang dicapai atas Penggunaan Anggaran. Prestasi Kerja yang dimaksud disini adalah Kinerja yang didefinisikan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak dicapai sehubungan dengan Penggunaan Anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk pencapaian kinerja terbaik tentunya memerlukan analisa yang tepat, menyangkut Sumber Daya yang ada, antara lain :

- a. Sumber Daya Manusia.
- b. Sumber Dana/ Anggaran.



Analisis dari efisiensi sumber daya dari kondisi yang ada saat ini di Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat :

a. Sumber Daya Manusia.

a.1 Dalam hal pengelolaan SDM, harus mendapat perhatian khusus, terutama yang berkaitan dengan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK). Sehingga pendistribusian pegawai sesuai dengan kebutuhan, terutama pada bidang-bidang yang terkait langsung dengan pencapaian target kinerja.

a.2. Masih kurangnya tenaga yang kompeten harus diminimalisir dengan memperbanyak kuantitas (volume) diklat – diklat teknis yang berkesesuaian dengan kebutuhan kerja.

b. Sumber Dana/ Anggaran

Efisiensi terhadap penggunaan anggaran sangat menentukan dalam pencapaian target kinerja. Karena dalam Target Kinerja SKPD, yang diukur tidak hanya pencapaian fisik dari kegiatan, tetapi juga realisasi keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Karena hal ini memperlihatkan sesuai atau tidaknya proses perencanaan dengan penganggaran serta pelaksanaan kegiatan.



III.A.6 ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Untuk mendukung urusan wajib Perhubungan Th. 2020 dialokasikan anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. **19.347.174.826,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. **9.225.257.931,-** dan Belanja Langsung (BL) Rp. **10.121.916.895,-**. Untuk **realisasi** anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. **8.885.167.654 / (96,31 %)** dan **realisasi** anggaran Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. **9.429.246.088 / (93,16 %)**.

Tabel III.A.5 Daftar Kegiatan yang Dilakukan Perubahan Anggaran

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Setelah refocusing	Pagu Setelah Perubahan	Bertambah/Ber kurang
I	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	3.306.623.213	3.302.210.387	3.175.913.159	(130.710.054)
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.940.000	157.602.500	157.602.500	132.662.500
2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.000.000	14.000.000	11.000.000	(3.000.000)
3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.300.000	301.100.000	264.200.000	(28.100.000)
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	1.561.200.000	1.561.200.000	1.553.141.772	(8.058.228)
5	Penyediaan Alat Tulis Kanto	126.000.000	96.000.000	96.000.000	(30.000.000)
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	102.502.400	82.502.400	82.502.400	(20.000.000)
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.802.246	42.802.246	37.802.246	(5.000.000)
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	287.913.000	258.508.000	214.169.000	(73.744.000)
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	487.385.567	335.155.241	306.155.241	(181.230.326)
10	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	35.000.000	25.000.000	25.000.000	(10.000.000)
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	332.580.000	428.340.000	428.340.000	95.760.000
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	437.420.000	197.281.550	233.418.073	(204.001.927)
12	Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	-	-	(50.000.000)
13	Pengadaan Mebeleur	40.000.000	-	-	(40.000.000)
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190.000.000	142.511.550	178.648.073	(11.351.927)
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	37.770.000	17.770.000	17.770.000	(20.000.000)
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	35.000.000	25.000.000	25.000.000	(10.000.000)



17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	24.000.000	12.000.000	12.000.000	(12.000.000)
18	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	60.650.000	-	-	(60.650.000)
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	134.250.000	134.250.000	124.834.200	(9.415.800)
19	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	134.250.000	134.250.000	124.834.200	(9.415.800)
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	212.868.499	32.558.918	32.558.918	(180.309.581)
20	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	212.868.499	32.558.918	32.558.918	(180.309.581)
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	353.874.860	302.231.943	300.733.817	(53.141.043)
21	Penatausahaan Keuangan SKPD	219.400.000	206.600.000	206.600.000	(12.800.000)
22	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	64.788.660	50.945.743	50.945.743	(13.842.917)
23	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	69.686.200	44.686.200	43.188.074	(26.498.126)
VI	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.608.106.658	973.486.793	932.062.598	(1.676.044.060)
24	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	991.221.000	2.650.000	2.650.000	(988.571.000)
25	Pengadaan Dan Pemasangan (Rambu, Rarka, Guardrail,deliniator,cermin Tikungan,traffic Light Dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan	1.020.556.793	711.836.793	671.407.616	(349.149.177)
26	Pengadaan Dan Pemasangan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour De Singkarak	160.617.533	-	-	(160.617.533)
27	Pengadaan Dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) Di Sumatera Barat	176.711.332	-	-	(176.711.332)
28	Pemeliharaan/perawatan (Rambu,marka, Guardrail,deliniator Dan Traffic Light) Sarana Perlengkapan Jalan	259.000.000	259.000.000	258.004.982	(995.018)
VII	Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.423.549.988	1.269.412.495	1.345.658.257	(3.077.891.731)
29	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan jalan.	249.500.000	6.505.550	6.505.550	(242.994.450)
30	Penyediaan pelayanan angkutan pekan nasional tani dan nelayan tahun 2020	1.509.270.000	945.000	945.000	(1.508.325.000)
31	Studi Implementasi Keterminal Tipe B Rawamangun dan Terminal Tirtonadi Solo	64.841.400	-	-	(64.841.400)
32	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVII Tahun 2020	889.825.000	-	-	(889.825.000)
33	Buku Statistik Perhubungan	30.000.000	30.000.000	29.225.000	(775.000)



34	Pemantauan Angkutan Lebaran	40.154.764	40.154.764	38.175.526	(1.979.238)
35	Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dengan Instansi Terkait	272.815.550	83.666.000	83.666.000	(189.149.550)
36	Pemilihan Abdi Yasa Teladan	127.715.000	-	-	(127.715.000)
37	Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	40.040.000	8.419.000	8.419.000	(31.621.000)
38	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	135.872.500	-	-	(135.872.500)
39	Pembinaan Dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor	15.203.000	2.805.000	2.805.000	(12.398.000)
40	Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi Dan Tingkat Nasional	55.950.800	-	-	(55.950.800)
41	Forum Komunikasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lalu Lintas Angkutan Umum Prov.Sumbar	62.000.350	1.361.000	1.361.000	(60.639.350)
42	Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan	87.107.800	19.453.600	19.453.600	(67.654.200)
43	Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Di Terminal Tipe A Dan B / Di Jalan	86.197.224	39.548.000	39.548.000	(46.649.224)
44	Satuan Tugas Pengawasan Bermotor Di Jalan (STPJ)	117.955.000	117.955.000	196.955.000	79.000.000
45	Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Penumpang Umum	128.500.000	29.161.603	29.161.603	(99.338.397)
46	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Untuk Para Calon Jemaah Haji	49.750.000	38.589.000	38.589.000	(11.161.000)
47	Monitoring Dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B	62.812.000	75.589.500	75.589.500	12.777.500
48	Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum	198.400.000	-	-	(198.400.000)
49	Penghargaan Wahana Tata Nugrahan	199.639.600	-	-	(199.639.600)
50	Peningkatan Kapasitas dan Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PHJD)	-	775.259.478	775.259.478	775.259.478
VIII	Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	216.765.100	104.374.350	104.374.350	(112.390.750)
51	Penilaian Andalalin di Jalan Provinsi Sumbar	30.000.000	271.500	271.500	(29.728.500)
52	Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	113.256.025	65.302.500	65.302.500	(47.953.525)
53	Monitoring Dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis	61.055.600	38.800.350	38.800.350	(22.255.250)
54	Evaluasi Dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	12.453.475	-	-	(12.453.475)
IX	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perkerataapian	781.491.820	311.235.426	298.982.726	(482.509.094)



55	Pembangunan Pembatas Jalan dengan Jalur KA untuk Peningkatan Keselamatan KA	195.335.920	-	-	(195.335.920)
56	Pengumpulan dan Analisis Data Angkutan Kereta Api di Sumbar	51.067.400	51.067.400	39.819.400	(11.248.000)
57	Investigasi Kecelakaan Kereta Api dan Inventarisasi Keselamatan Kereta Api	75.000.000	54.674.750	54.674.750	(20.325.250)
58	Monitoring Pelayanan Angkutan Kereta Api Perintis di Sumbar	29.323.600	651.000	651.000	(28.672.600)
59	Sosialisasi Keselamatan Kereta Api	123.271.000	-	-	(123.271.000)
60	Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api Pada Ruas Jalan Di Sumatera Barat	179.172.200	179.172.200	178.167.500	(1.004.700)
61	Pengembangan/Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api Sumatera Barat	128.321.700	25.670.076	25.670.076	(102.651.624)
X	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Transportasi Laut	959.544.000	548.323.335	468.323.335	(491.220.665)
62	Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar	51.244.000	4.601.450	4.601.450	(46.642.550)
63	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Tua Pejat dan Sinakak	603.712.000	456.712.000	376.712.000	(227.000.000)
64	Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Angkutan Laut	29.588.000	-	-	(29.588.000)
65	Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar	150.000.000	75.000.000	75.000.000	(75.000.000)
66	Pembinaan Tentang Keselamatan Pelayaran Kab/Kota Se Sumbar	125.000.000	12.009.885	12.009.885	(112.990.115)

Dari 66 kegiatan yang dilakukan refocusing COVID-19 dan perubahan anggaran. Hal ini tentunya membuat target kinerja dari kegiatan tersebut tidak mencapai target yang diinginkan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

Anggaran Setelah Refocussin COVID-19 dan Perubahan

1. Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor

Anggaran = Rp. 3.175.913.159,-

Realisasi Fisik = 100.00%

Realisasi Keuangan = Rp. 156.297.150,- (99.17%)

Sisa anggaran = Rp. 1.305.350,-



2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Anggaran	= Rp. 11.000.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 10.463.356,- (95.12%)
Sisa anggaran	= Rp. 536.644,-

3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Anggaran	= Rp. 264.200.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 239.043.565,- (90.48%)
Sisa anggaran	= Rp. 25.156.435,-

4. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor

Anggaran	= Rp. 1.553.141.772,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 1.534.025.335,- (98.77%)
Sisa anggaran	= Rp. 19.116.437,-

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Anggaran	= Rp. 96.000.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 95.999.900,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp. 100,-

6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Anggaran	= Rp. 82.502.400,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 82.501.358,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp. 1.042,-

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Anggaran	= Rp. 37.802.246,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 37.801.184,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp. 1.062,-



8. Penyediaan Makanan dan Minuman

Anggaran	= Rp. 214.169.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 213.967.000,- (99.91 %)
Sisa anggaran	= Rp. 202.000,-

9. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Anggaran	= Rp. 306.1555.241,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 306.036.614,- (99.96 %)
Sisa anggaran	= Rp. 118.627 ,-

10. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi

Anggaran	= Rp. 25.000.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 24.950.000,- (99.80 %)
Sisa anggaran	= Rp. 50.000 ,-

11. Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Anggaran	= Rp. 428.340.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 420.745.250,- (98.23 %)
Sisa anggaran	= Rp. 7.594.750,-

12. Pembangunan Gedung Kantor (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

13. Pengadaan Mebeleur (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Anggaran	= Rp. 178.648.073,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 175.525.469,- (98.25 %)
Sisa anggaran	= Rp. 3.122.604,-



15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Anggaran	= Rp. 17.770.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 17.412.500,- (97.99 %)
Sisa anggaran	= Rp. 357.500,-

16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan

Anggaran	= Rp. 25.000.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 24.344.000,- (97.38%)
Sisa anggaran	= Rp. 656.000,-

17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi

Anggaran	= Rp. 12.000.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 11.990.000,- (99.92 %)
Sisa anggaran	= Rp. 10.000,-

18. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

19. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapan Lainnya

Anggaran	= Rp 124.834.200,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 12.834.200,- (100 %)
Sisa anggaran	= Rp. 0,-

20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Anggaran	= Rp 32.558.918,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp 32.558.918,- (100 %)
Sisa anggaran	= Rp. 0,-



21. Penatausahaan Keuangan SKPD

Anggaran	= Rp. 206.600.000,-
Realisasi Fisik	= 100.00%
Realisasi Keuangan	= Rp. 201.040.000,- (97.31 %)
Sisa anggaran	= Rp. 5.560.000,-

22. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Anggaran	= Rp. 50.945.743,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 50.145.850,- (98.43 %)
Sisa anggaran	= Rp. 799.893,-

23. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD

Anggaran	= Rp. 43.188.074,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 42.428.074,- (98.24 %)
Sisa anggaran	= Rp. 760.000,-

24. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)

Anggaran	= Rp. 2.650.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 2.650.000,- (100 %)
Sisa anggaran	= Rp. 0,-

25. Pengadaan dan Pemasangan (Rambu, Rarka, Guardrail, Delinator, Cermin Tikungan, Traffic Light dan ZoSS) Sarana Perlengkapan Jalan

Anggaran	= Rp. 671.407.616,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 656.470.032,- (97.78 %)
Sisa anggaran	= Rp. 14.937.584,-

26. Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Prasarana Lalu Lintas Pendukung Tour De Singkarak (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)



27. Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan) di Sumatera Barat (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)
28. Pemeliharaan/Perawatan (Rambu, Marka, Guardrail, Delinator danTraffic Light) Sarana Perlengkapan Jalan
- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 258.004.982,- |
| Realisasi Fisik | = 100 |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 222.121.357,- (86.09 %) |
| Sisa anggaran | = Rp. 35.883.625,- |
29. Pengumpulan dan Analisis Data base Pelayanan Jasa Angkutan Jalan
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| Anggaran | = Rp. 6.505.550,- |
| Realisasi Fisik | = 100.00% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 6.505.550,- (100 %) |
| Sisa anggaran | = Rp. 0,- |
30. Penyediaan Pelayanan Angkutan Pekan Nasional Tani dan Nelayan Tahun 2020
- | | |
|--------------------|-------------------------|
| Anggaran | = Rp. 945.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100 % |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 945.000,- (100%) |
| Sisa anggaran | = Rp.0,- |
31. Studi Implementasi Ke Terminal Tipe B Rawamangun dan Terminal Tirtonadi Solo (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)
32. Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVII Tahun 2020 (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)
33. Buku Statistik Perhubungan
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Anggaran | = Rp. 29.255.000,- |
| Realisasi Fisik | = 100% |
| Realisasi Keuangan | = Rp. 29.198.928,- (99.91%) |
| Sisa anggaran | = Rp. 26.072,- |



34. Pemantauan Angkutan Lebaran

Anggaran = Rp. 38.175.526,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 37.893.026,- (99.26%)
Sisa anggaran = Rp. 282.500,-

35. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dengan Instansi Terkait

Anggaran = Rp. 83.666.000,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 83.666.000,- (100%)
Sisa anggaran = Rp. 0,-

36. Pemilihan Abdi Yasa Teladan (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

37. Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Anggaran = Rp. 8.419.000,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 8.399.000,- (99.76%)
Sisa anggaran = Rp. 20.000,-

38. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

39. Pembinaan dan Pengawasan Bengkel Karoseri Industri Kendaraan Bermotor

Anggaran = Rp. 2.805.000,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 2.805.000,- (100%)
Sisa anggaran = Rp.0,-

40. Rapat Koordinasi Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)



41. Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

Anggaran	= Rp. 19.453.600,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 19.453.600,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-

42. Pemeriksaan Perizinan Kendaraan Angkutan Umum di Terminal Tipe Adan B / di Jalan

Anggaran	= Rp. 39.548.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. Rp. 39.548.000,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-

43. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)

Anggaran	= Rp. 196.955.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. Rp. 196.713.000,- (99.88%)
Sisa anggaran	= Rp.242.000,-

44. Satuan Tugas Pengawasan Bermotor di Jalan (STPJ)

Anggaran	= Rp. 196.955.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 196.713.000,- (99.88%)
Sisa anggaran	= Rp.242.000,-

45. Pemeriksaan Laik Jalan Angkutan Umum

Anggaran	= Rp. 29.161.603,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 29.161.603,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-



46. Sosialisasi Keselamatan Transportasi Untuk Para Calon Jemaah Haji

Anggaran	= Rp. 38.589.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 38.549.000,- (99.90%)
Sisa anggaran	= Rp.40.000,-

47. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Operasional Terminal Type B

Anggaran	= Rp. 75.589.500,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 75.212.300,- (99.50%)
Sisa anggaran	= Rp.377.200,-

48. Pembinaan Pengusaha Angkutan Umum (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

49. Penghargaan Wahana Tata Nugraha (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

50. Peningkatan Kapasitas dan Peran Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (PHJD)

Anggaran	= Rp. 775.259.478,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 629.452.600,- (81.19%)
Sisa anggaran	= Rp.145.806.878,-

51. Penilaian Andalalin di Jalan Provinsi Sumbar

Anggaran	= Rp. 271.500,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 271.500,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-

52. Penyuluhan / Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Anggaran	= Rp. 65.302.500,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 65.252.500,- (99.92%)
Sisa anggaran	= Rp.50.000,-



53. Monitoring dan Pembinaan Penyelenggaraan Angkutan Perintis

Anggaran	= Rp. 38.800.350,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 38.400.350,- (98.97%)
Sisa anggaran	= Rp.400.000,-

54. Evaluasi dan Monitoring Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

55. Pembangunan Pembatas Jalan dengan Jalur KA Untuk Peningkatan Keselamatan KA (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

56. Pengumpulan dan Analisis Data Angkutan Kereta Api di Sumbar

Anggaran	= Rp. 39.819.400,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 32.806.980,- (82.39%)
Sisa anggaran	= Rp.7.012.420,-

57. Investigasi Kecelakaan Kereta Api dan Inventarisasi Keselamatan Kereta Api

Anggaran	= Rp. 54.674.750,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 52.884.250,- (96.73%)
Sisa anggaran	= Rp.1.790.500,-

58. Monitoring Pelayanan Angkutan Kereta Api Perintis di Sumbar

Anggaran	= Rp. 651.000,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 651.000,- (100%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-

59. Sosialisasi Keselamatan Kereta Api (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)



60. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) Perlintasan Sebidang Jalan Kereta Api Pada Ruas Jalan di Sumbar

Anggaran = Rp. 178.167.500,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 177.821.318,- (99.81%)
Sisa anggaran = Rp.346.182,-

61. Pengembangan / Pembangunan Sarana Prasarana Kereta Api di Sumbar

Anggaran = Rp. 25.670.076,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 25.670.076,- (100%)
Sisa anggaran = Rp.0,-

62. Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau di Sumbar

Anggaran = Rp. 4.601.450,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 4.601.450,- (100%)
Sisa anggaran = Rp.0,-

63. Penyusunan Dokumen Lingkungan Pelabuhan Laut Tua Pejat dan Sinakak

Anggaran = Rp. 376.712.000,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 364.051.059,- (96.64%)
Sisa anggaran = Rp.12.660.941,-

64. Evaluasi dan Pembinaan Perusahaan Jasa Penunjang Angkutan Laut (Kegiatan Tidak Dilaksanakan Dikarenakan Refocusing Anggaran)

65. Pengawasan dan Pembinaan Pelabuhan di Prov. Sumbar

Anggaran = Rp. 75.000.000,-
Realisasi Fisik = 100%
Realisasi Keuangan = Rp. 68.616.591,- (91.49%)
Sisa anggaran = Rp.6.383.409,-



66. Pembinaan Tentang Keselamatan Pelayaran Kabupaten/Kota Se Sumbar

Anggaran	= Rp. 12.009.885,-
Realisasi Fisik	= 100%
Realisasi Keuangan	= Rp. 12.009.885,- (91.49%)
Sisa anggaran	= Rp.0,-

Dari 66 kegiatan yang dilakukan efisiensi dan refocusing anggaran COVID-19, mengakibatkan tidak tercapainya capaian kinerja yang terkait dengan Pengukuran Kinerja Dinas, karena dari awal dilakukannya efisiensi dan refocusing anggaran COVID-19 memang telah dianalisa, hal ini akan mengakibatkan tidak tercapainya capaian indikator Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat. Kedepan diharapkan agar Penundaan Penyaluran Dana Alokasi Umum dan refocusing anggaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah seperti saat ini agar tidak terjadi lagi, karena akan mengganggu target-target pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga harus melakukan revisi target kedepan.

Dari 66 kegiatan diatas, ada 5 kegiatan yang juga tidak mencapai target realisasi keuangan dan fisik yang diharapkan, penyebabnya antara lain :

1. Tidak dilakukannya efisiensi anggaran saat anggaran perubahan dilaksanakan.
2. Tidak intensifnya pengawasan dan evaluasi dari kegiatan.

Sementara 42 kegiatan lainnya dapat mencapai target yang diharapkan, baik dari pencapaian fisik maupun realisasi keuangan. Dari hasil analisa terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, dapat ditarik kesimpulan :

1. Konsistennya Perencanaan dengan proses pelaksanaan kegiatan
2. Adanya perencanaan yang matang didalam menyusun suatu program/kegiatan yang terkait dengan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan.
3. Penetapan indikator kinerja yang tepat, terukur dan dapat dicapai.
4. Pengawasan dan evaluasi terhadap semua kegiatan, terutama yang rutin dilaksanakan setiap tahun.
5. Koordinasi yang intens baik internal maupun eksternal.



B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 19.347.174.826,- dengan rincian :

- a. Belanja Tidak Langsung: Rp. 9.225.257.931,-
- b. Belanja Langsung : Rp 10.121.916.895,-

Dari pagu anggaran tersebut terealisasi :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - Realisasi Keuangan : Rp 8.885.167.654,- (96.31 %)
 - Realisasi Fisik : 100 %
- b. Belanja Langsung
 - Realisasi Keuangan : Rp 9.429.246.088,- (93.16 %)
 - Realisasi Fisik : 100 %

Untuk lebih jelasnya realisasi anggaran tahun 2020 sesuai dengan program adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Anggaran = Rp 3.248.909.159,-
 - Realisasi = Rp 3.193.611.008,-
- 2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - Anggaran = Rp 625.585.036,-
 - Realisasi = Rp 620.538.819,-
- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - Anggaran = Rp 124.834.200,-
 - Realisasi = Rp 124.834.200,-
- 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - Anggaran = Rp 32.558.918,-
 - Realisasi = Rp 32.558.918,-
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
 - Anggaran = Rp 366.292.721,-
 - Realisasi = Rp 358.873.030,-



6. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Anggaran = Rp 932.062.598,-
Realisasi = Rp 881.241.389,-
7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Anggaran = Rp 92.164.000,-
Realisasi = Rp 91.516.950,-
8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Anggaran = Rp 3.446.609.852,-
Realisasi = Rp 2.910.266.607,-
9. Program Peningkatan dan Pengamanan Lau Lintas
Anggaran = Rp 310.594.350,-
Realisasi = Rp 304.891.488,-
10. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
Anggaran = Rp 298.982.726,-
Realisasi = Rp 289.833.624,-
11. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
Anggaran = Rp 643.323.335,-
Realisasi = Rp 621.080.055,-



BAB IV

PENUTUP

Dengan selesainya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun 2020, yang disusun dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan Penetapan Kinerja sebagai tanda suatu kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun. Secara umum kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dikategorikan **Sangat Baik** (dengan kisaran nilai 85 -100).

Berdasarkan uraian dan analisis kinerja dari belanja langsung sebagaimana diungkapkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja Dinas Perhubungan telah terealisasi fisiknya mencapai 100 % analisis atas akuntabilitas keuangan mencapai 94.66% .

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan dapat dikategorikan baik meskipun terjadi bencana non alam Pandemi COVID-19, namun perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk masa yang akan datang dalam penyempurnaan-penyempurnaan Kinerja Dinas, untuk itu perlu Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia maupun pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang.

Terhadap kondisi tersebut, strategi di masa mendatang yang perlu dikembangkan adalah :

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan senantiasa mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/ Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.
2. Meningkatkan responsibilitas aparatur terhadap segala permasalahan yang timbul, sehingga diharapkan kasus unjuk rasa sebagai indikator ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat ditekan/ menurun.
3. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi di tingkat manajerial, guna pencapaian kinerja yang lebih baik.



Penyusunan LAKIP 2020 masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat komitmen perbaikan bersama. Untuk hal tersebut, guna kesempurnaan LAKIP yang akan datang perlu ada masukan yaitu :

1. Mewujudkan dokumen perencanaan kinerja yang didukung dengan target-target indikator kinerja (*input, output, outcome*) yang terukur.
2. Mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja yang komprehensif dan transparan di masing-masing unit kerja dengan mengacu pada perkembangan data Indikator Kinerja Utama.
3. Indikator Kinerja Utama segera dirumuskan dan diaplikasikan sebagai alat evaluasi kinerja untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai program-program pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar setiap Unit Kerja membangun data kinerja yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan.
5. Masing-masing Unit Kerja dapat melakukan analisis efisiensi dan efektivitas dengan didasarkan pada capaian indikator kinerja *input, output dan outcome*.



LAMPIRAN